

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Hal tersebut mungkin terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelolanya. Peningkatan PAD akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan *outcome* dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM;
2. DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Hal tersebut mungkin terjadi karena DAU merupakan komponen dana perimbangan yang paling besar dan penggunaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penggunaan DAU sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan IPM;
3. DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Hal tersebut mungkin terjadi karena DAK digunakan untuk mendanai proyek fisik pada bidang yang menjadi prioritas nasional. Proyek-proyek fisik tersebut menghasilkan infrastruktur yang dapat menopang kegiatan perekonomian sehingga memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan IPM di daerah; serta

4. DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Hal tersebut mungkin terjadi karena DBH tidak diatur secara jelas penggunaannya, sehingga pembelanjaan DBH tidak jelas *output* maupun *outcome* nya. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut memungkinkan pemerintah provinsi untuk membelanjakan DBH secara tidak efisien dan efektif, dan cenderung tidak terdistribusi ke seluruh wilayah, akibatnya pembelanjaan DBH tidak dapat memicu adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi maupun IPM.

1.2. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi penerimaan pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari perspektif pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kewenangan pemerintah pusat adalah mengalokasikan dana transfer yang selanjutnya menjadi penerimaan bagi pemerintah daerah. Sementara penggunaan dana transfer tersebut sudah merupakan kewenangan pemerintah daerah;
2. Periode waktu yang dipakai dalam penelitian ini hanya sampai tahun 2015 untuk pelaksanaan penelitian di tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan penulis terkendala dalam memperoleh data yang paling baru sampai dengan tahun 2016; serta

3. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah provinsi yang masih memiliki capaian PDRB dan IPM yang termasuk tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya di luar Jawa, terutama di wilayah timur Indonesia.

1.3. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Analisis atas pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia akan lebih komprehensif apabila dilakukan tidak hanya dari perspektif penerimaan daerah, tetapi juga dilakukan dari perspektif pengeluaran daerah;
2. Menambah jangka waktu penelitian dan jika memungkinkan, gunakan data yang lebih *update*; serta
3. Menggunakan objek daerah penelitian dengan nilai capaian PDRB dan IPM yang lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan.